

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang

1. Profil Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang terletak di Komplek Araya Business Center Kavling 1, Jalan Panji Suroso, Arjosari, Malang. Dibangun di atas lahan seluas 3000 m² dengan desain minimalis modern. KPP Madya Malang dirancang berbeda dengan bangunan instansi pemerintah pada umumnya. Desain yang luwes dan ramah lengkap dengan berbagai fasilitas penunjang diharapkan mampu memberikan suasana yang bersahabat bagi para Wajib Pajak. Berdiri sejak Tahun 2007. KPP Madya Malang merupakan salah satu perwujudan dari proses modernisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006, ditetapkanlah Saat Mulai Operasi (SMO) dari KPP Madya Malang mulai tanggal 9 April 2007. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, KPP Madya Malang mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Madya menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan, pencairan dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, dan penyajian informasi perpajakan
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan , serta penerimaan surat lainnya
- d. Penyuluhan perpajakan
- e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak
- f. Penatausahaan piutang pajak dan melaksanakan
- g. Pelaksanaan pemeriksaan pajak
- h. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
- i. Pelaksanaan konsultasi perpajakan
- j. Pelaksanaan intensifikasi
- k. Pembetulan ketetapan pajak
- l. Pelaksanaan administrasi kantor.

2. Visi Dan Misi

VISI

“Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Terbaik, yang menggunakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dipercaya dan dibanggakan masyarakat.”

MISI

“Dapat melayani masyarakat dalam bidang perpajakan dengan pelayanan yang excellent dan adil dan mampu turut serta mewujudkan kemandirian pembiayaan negara sesuai dengan potensi yang ada.”

3. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, KPP Madya Malang terbagi lagi menjadi beberapa seksi, sub bagian dan kelompok fungsional pemeriksa, dengan tugas masing-masing.

a. Sub Bagian Umum

Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Melakukan pengumpulan, pencairan, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekamana dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filing*, serta penyiapan laporan kinerja.

c. Seksi Pelayanan

Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

d. Seksi Penagihan

Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

e. Seksi Pemeriksaan

Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) I, II, III, dan IV

Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak serta evaluasi hasil banding.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 3 Bagan Organisasi
Sumber: KPP Madya Malang, 2017

Dalam menjalankan fungsinya, KPP Madya Malang didukung oleh para pegawai dengan kualifikasi dan kompetensi terbaik di bidang masing-masing. Sebanyak 103 pegawai, terdiri dari 90 pegawai pria dan 13 pegawai wanita, dengan bermacam disiplin ilmu dan tingkatan pendidikan bekerja dengan optimal untuk mencapai tujuan utama. Mencapai penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4. Jumlah Wajib Pajak Dan Wilayah Kerja

Untuk jumlah Wajib Pajak, data internal KPP Madya Malang mencatat, pada tahun 2008 jumlah Wajib Pajak efektif yang diadministrasikan oleh KPP Madya Malang sebanyak 867 Wajib pajak. Pada tahun 2014, jumlah ini meningkat 75% atau menjadi 1581 Wajib Pajak. KPP Madya Malang mengadministrasikan Wajib Pajak Badan Tertentu yang berdomisili di seluruh wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III. Wilayah kerja ini meliputi bagian tengah, timur dan selatan dari Propinsi Jawa Timur, yang mencakup 14 Kota/Kabupaten, diantaranya:

- a. Malang, dengan jumlah Wajib Pajak sebanyak 764 WP
- b. Batu, dengan jumlah Wajib Pajak sebanyak 37 WP
- c. Pasuruan, dengan jumlah Wajib Pajak sebanyak 246 WP
- d. Probolinggo, dengan jumlah Wajib Pajak sebanyak 56 WP
- e. Jember, dengan jumlah Wajib Pajak sebanyak 130 WP
- f. Lumajang, dengan jumlah Wajib Pajak sebanyak 33 WP
- g. Situbondo, dengan jumlah Wajib Pajak sebanyak 15 WP
- h. Bondowoso, dengan jumlah Wajib Pajak sebanyak 15 WP
- i. Banyuwangi, dengan jumlah Wajib Pajak sebanyak 60 WP
- j. Blitar, dengan jumlah Wajib Pajak sebanyak 36 WP
- k. Kediri, dengan jumlah Wajib Pajak sebanyak 115 WP
- l. Tulungagung, dengan jumlah Wajib Pajak sebanyak 51 WP
- m. Trenggalek, dengan jumlah Wajib Pajak sebanyak 7 WP
- n. Nganjuk, dengan jumlah Wajib Pajak sebanyak 12 WP.

B. Hasil Analisis Data

1. Deskriptif Statistik

Tabel 4 Deskriptif Statistik Variabel Penelitian

Variabel penelitian	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviasi
Surat Teguran	30	11,00	223,00	81,3333	51,39457
Surat Paksa	30	21,00	289,00	97,0667	62,92630
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	30	1,00	11,00	4,3667	2,74783
Pencairan Tunggakan WP Badan	30	334832087,00	46364682544,00	6784803995,63	11081350698,04
Valid (listwise)	N30				

Sumber: SPSS 20, data diolah (2017)

Pada tabel 4 disajikan deskriptif statistik variabel penelitian meliputi nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (mean) dan standart deviasi. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa jumlah sampel yang diamati pada penelitian ini adalah 30 sampel. Pada variabel Surat Teguran diperoleh rata-rata sebesar 81,33 dengan standart deviasi sebesar 51,39. Nilai variabel ini berkisar antara 11 hingga 223. Rata-rata variabel Surat Paksa sebesar 97,07 dengan standart deviasi sebesar 62,93. Nilai variabel ini berkisar antara 21 hingga 289. Rata-rata variabel Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebesar 4,37 dengan standart deviasi sebesar 2,75. Nilai variabel ini berkisar antara 1 hingga 11. Rata-rata variabel Pencairan Tunggakan WP Badan sebesar 6784803995,63 dengan standart deviasi sebesar

11081350698,04. Nilai variabel ini berkisar antara 334832087 hingga 46364682544.

a) Surat Teguran

Surat Teguran yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah Surat Teguran yang diterbitkan selama tahun 2014-2016 yang disajikan dalam bentuk unit bulanan. Tujuannya untuk mengetahui pengaruhnya terhadap Pencairan Tunggalan WP Badan. Berikut ini disajikan mengenai jumlah Surat Teguran yang telah diterbitkan dalam unit bulanan selama tahun 2014-2016 dalam satuan Unit, yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 5 Jumlah Surat Teguran per Bulan

Tahun 2014	Jumlah		Tahun 2015	Jumlah		Tahun 2016	Jumlah	
	Unit	Rupiah		Unit	Rupiah		Unit	Rupiah
Jan.	94	2.550.795.254	Jan.	116	10.562.984.445	Jan.	223	65.663.203.440
Feb.	-	-	Feb.	103	7.243.178.395	Feb.	21	35.367.018.878
Mar.	-	-	Mar.	50	1.170.030.694	Mar.	153	11.182.669.005
April	-	-	April	106	8.947.496.778	April	41	12.658.322.303
Mei	67	3.810.147.971	Mei	134	18.416.379.067	Mei	-	-
Juni	53	496.340.440	Juni	95	10.537.250.511	Juni	49	1.871.977.402
Juli	109	3.097.833.085	Juli	61	1.818.296.524	Juli	152	5.534.422.473

Agust.	34	374.400.460	Agust.	73	1.841.309.337	Agust.	28	4.490.294.192
Sept.	66	5.534.301.006	Sept.	51	4.499.741.517	Sept.	81	6.071.334.758
Okt.	-	-	Okt.	23	7.854.150.679	Okt.	11	310.336.465
Nov.	177	193.136.032	Nov.	94	13.092.715.357	Nov.	18	135.033.489
Des.	-	-	Des.	179	2.860.091.750	Des.	38	7.465.240.132

Sumber: KPP Madya Malang, 2017

Pada tabel 5 di atas menunjukkan bahwa jumlah Surat Teguran yang telah diterbitkan oleh KPP Madya Malang setiap bulannya selama tahun 2014-2016 mengalami peningkatan maupun penurunan. Pada tahun 2014, di bulan pertama terdapat 94 Surat Teguran yang telah diterbitkan, kemudian pada bulan selanjutnya yaitu pada bulan Februari sampai April tidak ada penerbitan Surat Teguran. Bulan Mei mulai ada penerbitan Surat Teguran lagi tetapi dengan jumlah yang lebih sedikit dari bulan Januari. Mulai bulan Juni sampai September penerbitan Surat Teguran bersifat fluktuasi, pada bulan Juni terdapat 53 surat yang telah diterbitkan, dan jumlah tersebut lebih sedikit dari bulan Mei. Kemudian pada bulan Juli terjadi peningkatan penerbitan Surat Teguran yaitu 109 surat, lalu untuk bulan Agustus terjadi penurunan penerbitan Surat Teguran yaitu 34 surat, dan pada bulan September terjadi peningkatan lagi yaitu sejumlah 66 Surat Teguran yang telah diterbitkan. Pada bulan Oktober tidak ada penerbitan surat. Kemudian pada November terdapat penerbitan kembali yaitu dengan jumlah 177 surat. Namun pada bulan Desember tidak ada penerbitan Surat Teguran.

Pada tahun 2015, setiap bulannya terdapat penerbitan Surat Teguran terus-menerus, dan juga bersifat fluktuasi. Bulan Januari terdapat 116 Surat Teguran yang telah diterbitkan, kemudian pada bulan Februari dan Maret terdapat penurunan penerbitan Surat Teguran, yaitu masing-masing sejumlah 103 dan 50 surat. Pada bulan April dan Mei terjadi peningkatan kembali penerbitan Surat Teguran, yaitu masing-masing sejumlah 106 dan 134 surat. Pada bulan Juni dan Juli terjadi penurunan penerbitan Surat Teguran, yaitu dengan jumlah masing-masing 95 dan 61. Kemudian pada bulan Agustus terjadi peningkatan dari bulan sebelumnya, yaitu sejumlah 73 surat. Pada bulan September dan Oktober terjadi penurunan penerbitan Surat Teguran lagi yaitu masing-masing sejumlah 51 dan 23 surat. Pada bulan November dan Desember terjadi peningkatan penerbitan Surat Teguran dengan jumlah masing-masing sebesar 94 dan 179 surat. Pada bulan Desember termasuk penerbitan Surat Teguran yang paling banyak selama tahun 2015.

Tahun 2016 terdapat satu bulan yang tidak ada penerbitan Surat Teguran, yaitu pada bulan Mei. Pada bulan Januari mencapai 223 Surat Teguran yang telah diterbitkan. Jumlah tersebut merupakan jumlah Surat Teguran terbanyak selama tahun 2014-2016. Kemudian pada bulan Februari terjadi penurunan yang jauh dari bulan sebelumnya yaitu sejumlah 21 surat. Pada bulan Maret terjadi peningkatan lagi yaitu sejumlah 153 surat. Tetapi pada bulan April terjadi penurunan kembali yaitu sejumlah 41 surat. Setelah bulan Mei tidak ada penerbitan surat, pada bulan Juni dan Juli terjadi peningkatan penerbitan Surat Teguran dari bulan April lalu, yaitu masing-masing sejumlah 49 dan 152. Kemudian mulai bulan Agustus

sampai November terjadi fluktuasi tiap bulannya, yaitu pada Agustus terjadi penurunan yaitu sejumlah 28 surat, kemudian bulan September terjadi peningkatan yaitu sejumlah 81 surat, lalu pada bulan Oktober menurun lagi menjadi 11 surat, dan pada bulan November meningkat menjadi 18 surat. Pada bulan Desember meningkat lagi dari bulan lalu sejumlah 38 Surat Teguran.

b) Surat Paksa

Surat Paksa yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah Surat Paksa yang telah diterbitkan selama tahun 2014-2016 yang disajikan dalam unit bulanan. Tujuannya untuk mengetahui pengaruhnya terhadap Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Badan. Berikut ini disajikan mengenai jumlah Surat Paksa yang telah diterbitkan dalam satuan bulanan selama tahun 2014-2016 dalam satuan Unit sebagai berikut:

Tabel 6 Jumlah Surat Paksa per Bulan

Tahun 2014	Jumlah		Tahun 2015	Jumlah		Tahun 2016	Jumlah	
	Unit	Rupiah		Unit	Rupiah		Unit	Rupiah
Jan.	21	1.160.603.402	Jan.	40	946.929.275	Jan.	92	21.056.499.105
Feb.	-	-	Feb.	93	9.275.351.674	Feb.	289	9.607.943.327
Mar	-	-	Mar.	53	5.111.094.516	Mar.	179	62.518.864.639
April	-	-	April	68	864.471.838	April	184	9.951.542.244
Mei	68	17.277.938.783	Mei	71	1.111.863.199	Mei	-	-

Juni	43	1.669.368.487	Juni	63	4.972.431.745	Juni	96	50.220.840.780
Juli	111	1.516.616.239	Juli	60	3.101.474.605	Juli	152	2.575.428.242
Agust.	29	2.834.880.774	Agust.	193	12.288.354.324	Agust.	118	5.763.266.894
Sept.	33	229.313.218	Sept.	99	5.145.994.928	Sept.	199	8.711.474.264
Okt.	-	-	Okt.	62	6.442.556.442	Okt.	109	4.302.997.371
Nov.	23	2.042.547.619	Nov.	111	12.021.687.107	Nov.	56	512.732.934
Des.	-	-	Des.	144	2.585.240.379	Des.	53	1.016.155.279

Sumber: KPP Madya Malang, 2017

Pada tabel 6 di atas menunjukkan bahwa jumlah Surat Paksa yang diterbitkan oleh pihak fiskus setiap bulannya mengalami penurunan maupun peningkatan. Pada tahun 2014, di bulan Januari terdapat 21 Surat Paksa yang telah diterbitkan. Setelah itu selama 3 bulan tidak ada penerbitan Surat Paksa, hal ini sama seperti dengan Surat Teguran yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian terdapat penerbitan Surat Paksa kembali yaitu pada bulan Mei sampai September. Tetapi pada bulan tersebut terjadi fluktuasi setiap bulannya. Mulai dari bulan Mei, terjadi peningkatan dari bulan Januari lalu yaitu sejumlah 68 surat, kemudian pada bulan Juni terjadi penurunan yaitu menjadi 43 surat, lalu pada bulan Juli mengalami kenaikan lagi sejumlah 111, lalu pada bulan September naik lagi menjadi 33 Surat Teguran. Kemudian pada bulan Oktober tidak ada penerbitan Surat Paksa, dan ada

penerbitan kembali pada bulan November yaitu sejumlah 23 Surat. Pada bulan Desember tidak ada penerbitan Surat Paksa.

Pada tahun 2015 terdapat penerbitan Surat Paksa terus-menerus setiap bulannya. Mulai bulan Januari sampai April terjadi fluktuasi setiap bulannya. Pada bulan Januari ke Februari terjadi peningkatan penerbitan, yaitu dari 40 ke 93 surat. Kemudian pada bulan Maret terjadi penurunan menjadi 53 dan pada bulan April naik lagi menjadi 68 surat. Kemudian pada bulan Mei naik lagi menjadi 71 Surat Paksa yang telah diterbitkan. Pada bulan Juni dan Juli mengalami penurunan penerbitan dari bulan Mei, yaitu masing-masing sejumlah 63 dan 60 Surat Paksa. Lalu pada bulan Agustus naik menjadi 193, dan itu merupakan jumlah Surat Paksa yang paling banyak diterbitkan pada tahun 2015. Pada bulan September dan Oktober mengalami penurunan masing-masing menjadi 99 dan 62 Surat Paksa. Lalu pada bulan November dan Desember mengalami kenaikan yang cukup banyak yaitu masing-masing sejumlah 111 dan 114 Surat Paksa yang telah diterbitkan.

Pada tahun 2016 di bulan Mei tidak terdapat penerbitan Surat Paksa. Hal ini sama seperti pada Surat Teguran yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Peneliti. Mulai bulan Januari sampai Oktober terjadi fluktuasi di tiap bulannya, kecuali pada Mei, karna tidak ada penerbitan Surat Paksa pada bulan tersebut. Bulan Januari terdapat 92 Surat Paksa yang telah diterbitkan. Kemudian pada bulan Februari terjadi peningkatan yang cukup banyak yaitu mencapai 289 Surat Paksa yang telah diterbitkan. Jumlah tersebut merupakan jumlah terbanyak dari keseluruhan Surat Paksa selama tahun 2014-2016. Kemudian pada bulan Maret

terjadi penurunan menjadi 179 surat, dan naik kembali pada bulan April yaitu sejumlah 184 surat. Kemudian pada bulan Juni terjadi penurunan dari bulan Mei yaitu sebanyak 96 surat. Lalu terjadi kenaikan penerbitan lagi pada bulan Juli yaitu sejumlah 152 surat, lalu pada bulan Agustus menurun lagi menjadi 118 surat, dan naik kembali pada bulan September menjadi 199 surat. Pada bulan Oktober sampai dengan Desember terjadi penurunan terus-menerus, yaitu masing-masing dengan jumlah 109, 56, dan 53 Surat Paksa yang telah diterbitkan.

c) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) yang digunakan pada penelitian ini adalah jumlah SPMP yang telah diterbitkan selama tahun 2014-2016 yang disajikan dalam unit bulanan. Tujuannya untuk mengetahui pengaruhnya terhadap Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Badan. Berikut akan disajikan mengenai jumlah SPMP dalam satuan bulanan selama tahun 2014-2016 dalam satuan unit sebagai berikut:

Tabel 7 Jumlah Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) per Bulan

Tahun 2014	Jumlah		Tahun 2015	Jumlah		Tahun 2016	Jumlah	
	Unit	Rupiah		Unit	Rupiah		Unit	Rupiah
Jan.	1	6.241.329	Jan.	4	800.065.904	Jan.	2	816.026.345
Feb.	-	-	Feb.	6	2.841.754.988	Feb.	6	191.041.134
Mar.	-	-	Mar.	2	866.316.573	Mar.	7	2.109.990.276
April	-	-	April	11	10.276.283.676	April	8	3.734.880.430

Mei	3	2.912.350.264	Mei	6	890.115.523	Mei	-	-
Juni	2	82.555.349	Juni	4	1.173.641.569	Juni	1	560.853.469
Juli	2	12.822.329.445	Juli	1	247.164.590	Juli	8	71.080.922
Agust.	2	1.129.648.410	Agust.	1	478.703.413	Agust.	3	6.785.291.028
Sept.	3	692.934.868	Sept.	1	302.633.062	Sept.	4	7.237.989.439
Okt.	-	-	Okt.	4	2.771.329.460	Okt.	7	6.173.339.158
Nov.	7	19.684.457.568	Nov.	7	3.909.717.460	Nov.	3	771.657.437
Des.	-	-	Des.	7	6.055.099	Des.	8	1.026.492.882

Sumber: KPP Madya Malang, 2017

Pada tabel 7 di atas menunjukkan bahwa jumlah SPMP yang diterbitkan setiap bulannya mengalami penurunan maupun peningkatan. Pada tahun 2014, di bulan Januari hanya ada penerbitan Surat Paksa sebanyak 1 surat. Kemudian pada bulan Februari sampai April tidak ada penerbitan SPMP. Hal tersebut sama seperti Surat Teguran dan Surat Paksa yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Peneliti. Kemudian pada bulan Mei terdapat penerbitan kembali yaitu sebanyak 3 surat. Pada bulan Juni sampai Agustus terdapat penerbitan dengan jumlah yang sama yaitu sebanyak 2 surat. Kemudian pada bulan September naik kembali menjadi 3 surat yang sama seperti bulan Mei. Pada bulan Oktober tidak ada penerbitan SPMP. Kemudian ada penerbitan SPMP kembali pada bulan November yaitu

sebanyak 9 surat. Jumlah tersebut merupakan jumlah terbanyak SPMP yang telah diterbitkan pada tahun 2014. Kemudian pada bulan Desember tidak ada penerbitan SPMP, sama seperti Surat Teguran dan Surat Paksa.

Pada tahun 2015 terjadi penerbitan SPMP yang berfluktuasi. Pada bulan Januari terdapat 4 SPMP yang telah diterbitkan, selain itu juga pada bulan Juni dan Oktober terdapat penerbitan SPMP dengan jumlah yang sama seperti bulan Januari. Kemudian pada bulan Februari terdapat penerbitan sebanyak 6 surat, dan juga dengan jumlah yang sama terdapat pada bulan Mei. Kemudian pada bulan Maret mengalami penurunan sebanyak 2 surat yang telah diterbitkan. Pada bulan April terdapat penerbitan SPMP sebanyak 11 surat, dan jumlah tersebut merupakan jumlah terbanyak selama tahun 2014-2016. Pada bulan Juli sampai September terdapat penerbitan SPMP dengan jumlah yang sama yaitu hanya sebanyak 1 surat. Lalu pada bulan November dan Desember terdapat 7 SPMP yang telah diterbitkan.

Pada tahun 2016, di bulan Mei tidak ada penerbitan SPMP, hal tersebut sama seperti Surat Teguran dan Surat Paksa yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Peneliti. Pada bulan Januari terdapat penerbitan SPMP sebanyak 2 surat. Kemudian pada bulan Februari sampai dengan April terjadi peningkatan secara berturut-turut, yaitu sebanyak 6, 7, dan 8 surat. Untuk bulan Maret terdapat kesamaan jumlah penerbitan SPMP dengan bulan Oktober, yaitu sebanyak 7 surat, lalu untuk bulan April terdapat kesamaan jumlah penerbitan SPMP dengan bulan Juli dan Desember, yaitu sebanyak 8 surat. Kemudian bulan Juni hanya ada 1 SPMP yang telah diterbitkan. Bulan Agustus dan November terdapat 3 surat

yang telah diterbitkan, dan untuk bulan September terdapat 4 surat yang telah diterbitkan. Jumlah SPMP yang diterbitkan jumlahnya lebih sedikit daripada Surat Teguran dan Surat Paksa sebelumnya, karena SPMP merupakan surat terakhir dari langkah-langkah suatu penagihan pajak. Sebelum SPMP terbit, harus ada penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa terlebih dahulu, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa Wajib Pajak akan melunasi tunggakan pajak ketika diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa.

d) Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Badan

Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Badan yang digunakan pada penelitian ini adalah total besarnya Tunggakan WP Badan yang telah berhasil dicairkan selama tahun 2014-2016 yang disajikan dalam unit bulanan. Berikut akan disajikan mengenai total besarnya Pencairan Tunggakan WP Badan dalam unit bulanan selama tahun 2014-2016 dalam satuan Rupiah sebagai berikut:

Tabel 8 Total Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Badan per Bulan

Tahun	Bulan	Surat Teguran	Surat Paksa	SPMP	TOTAL
2014	Jan.	254.405.353	1.307.856.129	319.300.715	1.881.562.197
	Feb.	-	-	-	-
	Mar.	-	-	-	-
	April	-	-	-	-
	Mei	319.164.647	389.836.076	63.650.692	772.651.415
	Juni	457.945.737	1.374.787.138	312.636.885	2.145.369.760

	Juli	302.646.143	642.995.071	801.614.018	1.747.255.232
	Agust.	1.614.853.587	314.196.314	554.856.854	2.483.906.755
	Sept.	88.157.399	1.001.155.858	773.504.290	1.862.817.547
	Okt.	-	-	-	-
	Nov.	13.499.507.115	1.554.153.264	1.114.079.290	16.167.739.669
	Des.	-	-	-	-
2015	Jan.	420.517.301	2.195.522.211	230.022.692	2.846.062.204
	Feb.	1.015.089.316	805.306.231	1.856.274.412	3.676.669.959
	Mar.	546.291.423	403.396.860	1.255.859.929	2.205.548.212
	April	48.168.913	870.684.521	1.141.616.786	2.060.470.220
	Mei	1.508.246.883	3.106.550.546	740.832.958	5.355.630.387
	Juni	2.082.507.594	511.132.771	1.913.319.071	4.506.959.436
	Juli	24.723.461	647.597.094	479.081.643	1.151.402.198
	Agust.	455.129.193	475.399.487	498.855.764	1.429.384.444
	Sept.	62.753.309	1.605.303.589	1.886.834.275	3.554.891.173
	Okt.	547.906.370	816.995.367	486.062.563	1.850.964.300

	Nov.	140.452.927	2.538.805.482	1.380.945.198	4.060.203.607
	Des.	698.399.425	42.625.866.265	3.040.416.854	46.364.682.544
2016	Jan.	106.128.314	791.980.533	141.931.296	1.040.040.143
	Feb.	765.946.157	9.951.357.324	1.354.632.140	12.071.935.621
	Mar.	27.943.824.150	815.876.617	298.842.800	29.058.543.567
	April	206.120.677	2.397.559.954	258.538.897	2.862.219.528
	Mei	-	-	-	-
	Juni	128.564.835	716.802.238	472.325.414	1.317.692.487
	Juli	97.235.321.	35.215.685.722	537.108.249	35.850.029.292
	Agust.	180.915.626	382.618.008	1.360.183.152	1.923.716.786
	Sept.	122.874.944	6.200.201.834	3.577.406.444	9.900.483.222
	Okt.	98.081.967	510.737.370	191.178.350	799.997.687
	Nov.	2.495.298	48.866.552	283.470.237	334.832.087
	Des.	1.092.440.960	951.479.251	216.537.979	2.260.458.190

Sumber: KPP Madya Malang, 2017

Pada tabel 8 di atas menunjukkan bahwa total besarnya Pencairan Tunggakan WP Badan setiap bulannya mengalami peningkatan maupun penurunan. Pada tahun 2014 bulan Januari, total Pencairan Tunggakan sebesar Rp 1.881.562.197. Kemudian pada bulan Februari sampai April tidak ada total pencairan, karena pada bulan tersebut juga tidak ada penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, dan SPMP. Kemudian mulai bulan Mei sampai dengan bulan September mulai ada pencairan lagi dan selalu mengalami kenaikan dan penurunan setiap bulannya. Pada mulai Mei terdapat pencairan sebesar Rp 772.651.415, kemudian pada bulan Juni naik menjadi Rp 2.145.369.760, lalu turun kembali pada bulan Juli sebesar Rp 1.747.255.232, kemudian naik lagi pada bulan Agustus yaitu sebesar Rp 2.483.906.755, dan turun lagi pada bulan September yaitu sebesar Rp 1.862.817.547. Pada bulan November mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu sejumlah Rp 16.167.739.669. Bulan Oktober dan Desember tidak ada Pencairan Tunggakan WP Badan, karena tidak ada penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, dan SPMP.

Tahun 2015 terjadi peningkatan dan penurunan total pencairan tunggakan yang cukup stabil. Kecuali pada bulan Desember, terdapat kenaikan yang cukup tinggi, yaitu mencapai Rp 46.364.682.544. Jumlah tersebut merupakan total terbanyak dari Pencairan Tunggakan WP Badan selama tahun 2014-2016.

Tahun 2016 pada bulan Mei tidak ada pencairan tunggakan, karena pada bulan itu tidak ada penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, dan SPMP. Bulan Januari terdapat pencairan sebesar Rp 1.040.040.143. Kemudian pada bulan Februari dan Maret terjadi peningkatan yang cukup tinggi, yaitu masing-masing

mencapai Rp 12.071.935.621 dan Rp 29.058.543.567. Kemudian mengalami penurunan kembali pada bulan April dan Juni, yaitu masing-masing sebesar Rp 2.862.219.528 dan Rp 1.317.692.487. Bulan Juli terjadi peningkatan yang bahkan lebih besar daripada jumlah pada bulan Februari dan Maret, yaitu sebesar Rp 35.850.029.292. Kemudian mengalami penurunan yang cukup banyak pada bulan Agustus yaitu sebesar Rp 1.923.716.786. Lalu naik kembali pada bulan September sebanyak Rp 9.900.483.222. Pada bulan Oktober dan November terjadi penurunan yang cukup banyak, bahkan tidak mencapai 1 Milyar rupiah, yaitu masing-masing sebesar Rp 799.997.687 dan Rp 334.832.087. Kemudian pada bulan Desember terdapat sedikit peningkatan yaitu sebesar Rp 2.260.458.190.

Peningkatan jumlah penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Melaksanakan Penyitaan yang terus terjadi setiap tahunnya, ini membuktikan bahwa kurang adanya evaluasi dari pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait dengan hal tersebut. Apabila pihak DJP bisa lebih tegas terhadap para Wajib Pajak yang telah menunggak pajaknya tersebut, maka tidak akan ada peningkatan penerbitan surat setiap tahunnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meningkatkan target penerimaan pajak tahun 2017 ini sebesar 20 triliun rupiah. Direktorat Jenderal Pajak diminta bekerja lebih keras sehingga *shortfall* bisa berkurang menjadi 30 triliun rupiah. Sri Mulyani mengatakan tambahan 20 triliun rupiah itu bisa didapat dari *extra effort*, yaitu penagihan, pemeriksaan, dan *gizjeling* (upaya akhir penagihan pajak). Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteady mengatakan akan terus melakukan penegakan hukum untuk mencapai target (Tempo.co, 2016). Menurut para pegawai pajak, faktor-faktor

yang menjadi dasar adanya tunggakan pajak tersebut diantaranya, Wajib Pajak kurang paham dengan peraturan pajak dan penerapannya dengan usaha yang sedang dijalankan, Wajib Pajak enggan untuk membayar pajak, terlalu banyak peraturan pajak yang tumpah tindih dan kurangnya sosialisasi dari DJP, serta kurangnya kesadaran untuk membayar pajak. Untuk lebih jelasnya mengenai peningkatan atau penurunan jumlah Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, dan total Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Badan setiap bulannya dapat dilihat pada Lampiran.

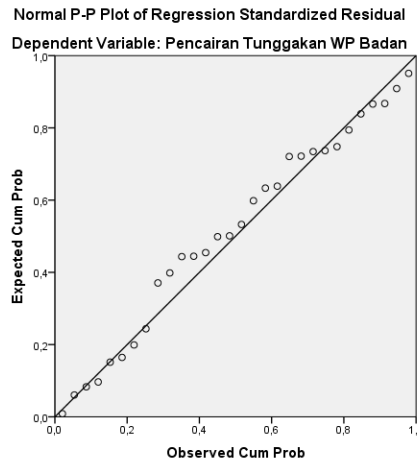
2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah pengujian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa uji asumsi klasik diantaranya uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikoleniaritas, dan uji autokorelasi. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan software SPSS versi 20, maka dihasilkan data sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas regresi bertujuan untuk menguji apakah residual dalam model regresi memiliki distribusi normal. Metode yang digunakan untuk menguji normalitas residual regresi menggunakan grafik normal P-P plot dan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Residual model dikatakan mengikuti distribusi normal apabila sebaran data pada grafik normal P-P plot terletak disekitar garis diagonal. Sedangkan dari uji Kolmogorov-Smirnov, bila nilai signifikansi hasil uji lebih

besar dari 0,05 maka asumsi normalitas terpenuhi. Hasil pengujian disajikan sebagai berikut:



Gambar 4 Grafik Normal P-P plot
Sumber: SPSS 20, Olahan Peneliti (2017)

Jika penyebaran data terletak disekitar garis diagonal maka data berdistribusi normal, sedangkan jika penyebaran data tidak terletak disekitar garis diagonal maka data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan gambar 4 di atas, asumsi normalitas menunjukkan bahwa sebaran data pada grafik normal P-P plot terletak disekitar garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian memiliki distribusi normal dengan penyebaran data terletak disekitar garis diagonal. Selain itu, keakuratan data ini perlu diuji kembali dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Nilai signifikansi terdistribusi normal jika signifikansi $> 0,05$ pada uji Kolmogorov-Smirnov. Apabila signifikansi $< 0,05$ maka tidak berdistribusi normal. Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov yang dilakukan peneliti, hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

Kolmogorov-Smirnov Z	Nilai sig.	Keterangan
0,587	0,882	Menyebar Normal

Sumber: SPSS 20, Olahan Peneliti (2017)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 9 di atas diketahui bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov yang terbentuk $> 0.05\%$ yaitu sebesar 0,587 sehingga dapat dikatakan bahwa data memiliki distribusi normal dan asumsi normalitas tersebut terpenuhi.

b. Uji Multikoleniaritas

Uji Multikoleniaritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model uji regresi yang baik selayaknya tidak terjadi multikoleniaritas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikoleniaritas dengan cara menganalisis matriks korelasi variabel-variabel independen yang dapat dilihat melalui Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Nilai VIF yang bisa ditoleransi adalah 10. Apabila nilai $VIF < 10$ dan nilai $Tolerance > 0,1$ maka disimpulkan tidak terjadi multikoleniaritas antar variabel bebas. Berikut adalah hasil pengujian multikoleniaritas:

Tabel 10 Hasil Uji Asumsi Multikoleniaritas

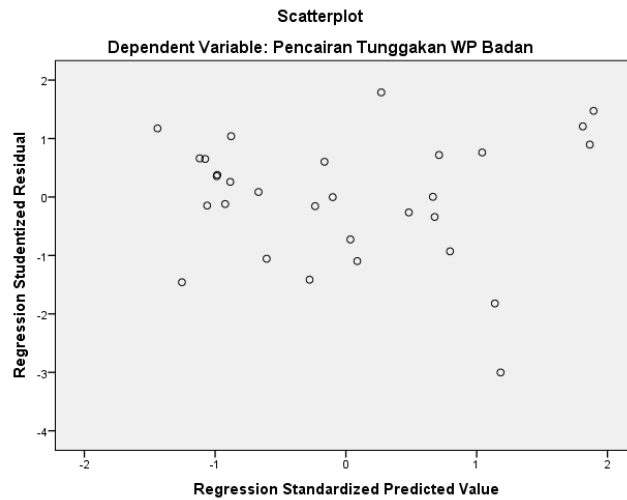
Variabel Bebas	Tolerance	VIF	Keterangan
Surat Teguran	0,957	1,045	Tidak terjadi Multikolinearitas
Surat Paksa	0,939	1,065	Tidak terjadi Multikolinearitas
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	0,900	1,111	Tidak terjadi Multikolinearitas

Sumber: SPSS 20, Olahan Peneliti (2017)

Berdasarkan tabel 10 di atas dapat diketahui variabel bebas dalam penelitian ini memiliki Tolerance lebih besar dari 0,1 dan Variance Inflation Factor lebih kecil dari 10, sehingga dapat dikatakan tidak terdapat gejala multikoleniaritas antara variabel bebas dalam penelitian ini.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji pendeteksian heteroskedastisitas dapat pula dilakukan dengan metode grafik yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SPRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SPRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah terprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$). Hasil pengujian menggunakan metode grafik adalah sebagai berikut:



Gambar 5 Scatter Plot

Sumber: SPSS 20, Olahan Peneliti (2017)

Berdasarkan grafik *scatterplot* tersebut terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Selain menggunakan metode grafik, pengujian asumsi heteroskedastisitas dapat dilakukan juga dengan metode pengujian statistik uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan variabel bebas terhadap nilai absolut residualnya. Apabila nilai $\text{sig.} > 0,05$ maka akan terjadi homoskedastisitas dan jika nilai $\text{sig.} < 0,05$ maka akan terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji Glejser dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11 Hasil Uji Glejser

Variabel Bebas	Sig.	Keterangan
Surat Teguran	0,072	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Surat Paksa	0,810	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	0,652	Tidak terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: SPSS 20, Olahan Peneliti (2017)

Berdasarkan tabel 11 di atas diketahui bahwa pada masing-masing variabel diperoleh nilai sig. $> 0,05$ maka disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Atau dengan kata lain asumsi non-heteroskedastisitas telah terpenuhi.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya ($t-1$). Analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, sehingga tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Untuk menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson. Berikut hasil perhitungan DW dengan menggunakan regresi:

Tabel 12 Hasil Pengujian Asumsi Non-Autokorelasi

Dl	4-dl	du	4-du	Dw	Interprestasi
1,214	2,786	1,650	2,350	2,145	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: SPSS 20, Olahan Peneliti (2017)

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 12 di atas diketahui bahwa nilai Durbin-Watson hasil pengujian berada diantara $du < dw < 4-du$

(1,650<2,145<2,350) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi yang terbentuk.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil perhitungan regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi besarnya hubungan antara variabel independen yaitu Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dengan variabel dependen yaitu Pencairan Tunggakan WP Badan. Hasil perhitungan yang menggunakan program SPSS 20 tersebut dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 13 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	19,910	0,413		48,185	0,000
1 Surat Teguran	0,009	0,003	0,412	2,907	0,007
Surat Paksa	0,006	0,003	0,339	2,366	0,026
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	0,133	0,062	0,317	2,165	0,040

Sumber: SPSS 20, Olahan Peneliti (2017)

Variabel terikat (dependen) pada hasil uji regresi berganda adalah Pencairan Tunggakan WP Badan sedangkan variabel bebasnya (independen) adalah Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Model regresi berdasarkan hasil analisis adalah:

$$\text{Pencairan Tunggakan WP Badan} = 19,910 + 0,009 \text{ Surat Teguran} + 0,006 \text{ Surat Paksa} + 0,133 \text{ Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan} + e$$

Interpretasi model regresi di atas adalah sebagai berikut:

a. $\beta_0 = 19,910$

Konstanta dari persamaan regresi ini menunjukkan nilai sebesar 19,910 artinya ketika tidak terdapat kontribusi variabel Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan akan bernilai sebesar 19,910.

b. $\beta_1 = 0,009$

Koefisien regresi ini menunjukkan kontribusi yang diberikan variabel Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan WP Badan. Koefisien variabel Surat Teguran bernilai positif, artinya setiap peningkatan variabel Surat Teguran sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan Pencairan Tunggakan WP Badan sebesar 0,009 dengan asumsi variabel lain konstan.

c. $\beta_2 = 0,006$

Koefisien regresi ini menunjukkan kontribusi yang diberikan variabel Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan WP Badan. Koefisien variabel Surat Paksa bernilai positif, artinya setiap peningkatan variabel Surat Paksa sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan Pencairan Tunggakan WP Badan sebesar 0,006 dengan asumsi variabel lain konstan.

d. $\beta_3 = 0,133$

Koefisien regresi ini menunjukkan kontribusi yang diberikan variabel Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Pencairan Tunggakan WP Badan.

Koefisien variabel Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan bernilai positif, artinya setiap peningkatan variabel Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan Pencairan Tunggakan WP Badan sebesar 0,133 dengan asumsi variabel lain konstan.

4. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan yaitu keputusan menerima atau menolak hipotesis tersebut. Adapun hipotesis yang telah dibuat oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti menggunakan uji t, uji F, dan Koefisien Determinasi (R^2) untuk menguji hipotesis yang telah dipaparkan pada Bab II sebelumnya. Hipotesis yang telah dipaparkan perlu diuji kebenarannya secara statistik melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Uji Parsial (Uji t)

Pengujian model regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen pembentuk model regresi secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Variabel independen pembentuk model regresi dikatakan berpengaruh signifikan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau signifikan $\alpha \leq 0,05$. Artinya apabila nilai t_{hitung} dari masing-masing variabel independen (Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan) lebih besar dari nilai t_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing dari variabel independen tersebut berpengaruh terhadap

variabel dependen (Pencairan Tunggakan WP Badan). Pengujian model regresi secara parsial adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel independen	t_{hitung}	Sig. t	t_{tabel}	Keterangan
Surat Teguran	2,907	0,007	2,056	Signifikan
Surat Paksa	2,366	0,026	2,056	Signifikan
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	2,165	0,040	2,056	Signifikan

Sumber: SPSS 20, Olahan Peneliti (2017)

1. Variabel Surat Teguran

Pada pengujian hipotesis variabel Surat Teguran diperoleh t_{hitung} sebesar 2,907 dengan nilai signifikansi sebesar 0,007. Nilai statistik uji t_{hitung} tersebut lebih besar daripada t_{tabel} ($2,907 > 2,056$) atau nilai signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Maka disimpulkan variabel Surat Teguran secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap variabel Pencairan Tunggakan WP Badan.

2. Variabel Surat Paksa

Pada pengujian hipotesis variabel Surat Paksa diperoleh t_{hitung} sebesar 2,366 dengan nilai signifikansi sebesar 0,026. Nilai statistik uji t_{hitung} tersebut lebih besar daripada t_{tabel} ($2,366 > 2,056$) atau nilai signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Surat Paksa secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap variabel Pencairan Tunggakan WP Badan.

3. Variabel Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Pada pengujian hipotesis variabel Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan diperoleh t_{hitung} sebesar 2,165 dengan nilai signifikansi sebesar 0,040. Nilai statistik uji t_{hitung} tersebut lebih besar daripada t_{tabel} ($2,165 > 2,056$) atau nilai signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap variabel Pencairan Tunggakan WP Badan.

Pada analisis regresi linier berganda, penentuan variabel independen (X) yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen (Y), dapat dilakukan dengan membandingkan koefisien regresi (Beta) antara variabel yang satu dengan yang lain. Variabel X yang paling dominan pengaruhnya terhadap variabel Y adalah variabel yang memiliki koefisien regresi (Beta) yang paling besar. Berikut adalah tabel peringkat yang membandingkan koefisien regresi masing-masing variabel independen:

Tabel 15 Ringkasan Hasil Analisis Regresi

Peringkat	Variabel	Koefisien Beta	Pengaruh
1	Surat Teguran	0,412	Signifikan
2	Surat Paksa	0,339	Signifikan
3	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	0,317	Signifikan

Sumber: SPSS 20, Olahan Peneliti (2017)

Berdasarkan tabel 15 di atas terlihat bahwa variabel Surat Teguran adalah variabel yang memiliki koefisien beta yang paling besar yaitu sebesar 0,412.

Artinya, variabel Y lebih banyak dipengaruhi oleh variabel Surat Teguran daripada variabel lainnya. Koefisien yang dimiliki oleh variabel Surat Teguran bertanda positif, hal ini berarti bahwa semakin tinggi Surat Teguran maka akan meningkatkan Pencairan Tunggakan WP Badan dan sebaliknya semakin rendah Surat Teguran maka Pencairan Tunggakan WP Badan akan semakin menurun.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji hipotesis pengaruh simultan dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Dalam hipotesis ini, diduga bahwa variabel Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan secara bersama-sama mempengaruhi Pencairan Tunggakan WP Badan. Variabel independen pembentuk model regresi dikatakan berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau signifikansi $< \alpha = 0,05$. Pengujian model regresi secara simultan adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	19,468	3	6,489	8,666	0,000
	Residual	19,469	26	,749		
	Total	38,937	29			

Sumber: SPSS 20, Olahan Peneliti (2017)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 16 di atas, diperoleh F_{hitung} sebesar 8,666 (Sig F = 0,000). F_{tabel} pada taraf nyata 5% dengan derajat independen 3 dan

26 sebesar 2,975. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($8,666 > 2,975$) dan $Sig F < 5\%$ ($0,000 < 0,05$) maka H_0 ditolak yang berarti bahwa secara bersama-sama variabel Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Pencairan Tunggakan WP Badan.

c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Y), sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Penelitian ini menggunakan nilai *Adjusted R Square* untuk mengevaluasi model regresi terbaik. Berikut adalah hasil analisis dari koefisien determinasi (R^2),

Tabel 17 Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,707	,500	,442		,86535	2,145

Sumber: SPSS 20, Olahan Peneliti, 2017

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,442 atau 44,2% oleh variabel Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Sedangkan sisanya sebesar 55,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi atau yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil dari analisis koefisien determinasi sebesar 44,2% variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas dalam penelitian ini. Kemudian terdapat 55,8% kemungkinan lain yang mempengaruhi Pencairan Tunggakan WP Badan diluar variabel yang diteliti. Berikut penjelasan mengenai keputusan hipotesis yang telah dilakukan:

Tabel 18 Keputusan Hipotesis

No.	Hipotesis	Keputusan Hipotesis
1	Surat Teguran berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan WP Badan	Diterima
2	Surat Paksa berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan WP Badan	Diterima
3	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan WP Badan	Diterima
4	Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan berpengaruh secara bersama-sama terhadap Pencairan Tunggakan WP Badan	Diterima

Sumber: Olahan Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel 18 hasil penelitian yang telah dilakukan pada halaman sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis pertama, kedua, ketiga, dan keempat dalam penelitian ini diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Teguran memberikan pengaruh terhadap Pencairan Tunggakan WP Badan, Surat Paksa memberikan pengaruh terhadap Pencairan Tunggakan WP Badan, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan memberikan pengaruh terhadap Pencairan Tunggakan WP Badan, serta Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah

Melaksanakan Penyitaan memberikan pengaruh secara bersama-sama terhadap Pencairan Tunggakan WP Badan.

1. Pengaruh Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada tabel 13 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan WP Badan sebesar 0,009. Pengaruh tersebut signifikan dibuktikan dengan uji t yang menunjukkan $\text{sig.t } (0,007 < \alpha (0,05))$. Hasil pengujian tersebut menerima hipotesis yang telah diajukan, yaitu Surat Teguran berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan WP Badan. Surat Teguran memiliki pengaruh positif terhadap Pencairan Tunggakan WP Badan, artinya setiap peningkatan variabel Surat Teguran sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan Pencairan Tunggakan WP Badan sebesar 0,009.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Budi (2011), yang menyatakan bahwa pelaksanaan tindakan penagihan melalui Surat Teguran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Badan. Selain itu, hal ini juga mendukung hasil penelitian dari Kumalasari (2004), yang menyimpulkan bahwa Surat Teguran menunjukkan adanya pengaruh yang nyata dan berhubungan positif dengan Pencairan Tunggakan WP Badan.

Prosedur penagihan pajak diawali dengan penerbitan Surat Teguran. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang tidak melunasi utang pajak setelah tanggal jatuh tempo akan dikirim Surat Teguran atau Surat Peringatan. Maksud dari

penerbitan Surat Teguran adalah menegur atau memperingatkan Wajib Pajak agar melunasi pajaknya sebelum diterbitkan surat paksa (Faishal, 2009:210). Teori tersebut berarti bahwa pihak Fiskus berhak untuk menagih utang Wajib Pajak yang tidak juga dilunasi setelah lewat jatuh tempo melalui Surat Teguran. Dengan adanya Surat Teguran yang diterbitkan kepada Wajib Pajak maka akan membantu pihak DJP dalam pencairan tunggakan Wajib Pajak. Hal tersebut terbukti dari hasil pengolahan data statistik oleh Peneliti menunjukkan bahwa penerbitan Surat Teguran berpengaruh signifikan positif terhadap pencairan tunggakan WP Badan. Hasil ini memberikan arti bahwa Surat Teguran merupakan salah satu faktor yang menentukan tinggi rendahnya pencairan tunggakan WP Badan.

2. Pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada tabel 13 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan WP Badan sebesar 0,006. Pengaruh tersebut signifikan dibuktikan dengan uji t yang menunjukkan $\text{sig.t } (0,026 < \alpha (0,05))$. Hasil pengujian tersebut menerima hipotesis yang telah diajukan, yaitu Surat Paksa berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan WP Badan. Surat Paksa memiliki pengaruh positif terhadap Pencairan Tunggakan WP Badan artinya setiap peningkatan variabel Surat Paksa sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan Pencairan Tunggakan WP Badan sebesar 0,006.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Budi (2011), berdasarkan penelitian dan perhitungan yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Surat

Paksa berpengaruh signifikan terhadap jumlah Pencairan Tunggakan untuk WP Badan. Selain itu juga ada kesimpulan dari penelitian Wibisono (2010), yang menyatakan bahwa pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa dapat dikatakan berjalan efektif. Pengihan pajak dengan Surat Paksa sangat efektif dalam mengurangi tunggakan pajak yang belum tertagih. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa berasal dari faktor eksternal (pihak Wajib Pajak) dan faktor-faktor pendukung internal (pihak Fiskus). Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian dari Kumalasari (2004), yang menunjukkan bahwa Surat Paksa terdapat pengaruh yang nyata dan berhubungan positif dengan Pencairan Tunggakan WP Badan, serta faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi Pencairan Tunggakan WP Badan yaitu pada variabel jumlah Surat Paksa.

Menurut Faisal (2009:210), Wajib Pajak setelah ditegur dengan Surat Teguran apabila tidak juga melunasi utang pajaknya, maka kantor pajak menerbitkan Surat Paksa. Surat Paksa ini diberitahukan atau disampaikan oleh juru sita pajak dengan dibebani biaya penagihan. Isi dari suatu Surat Paksa adalah perintah kepada Wajib Pajak untuk membayar tunggakan pajak beserta biaya penagihan dalam jangka waktu 2x24 jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa. Surat Paksa merupakan suatu produk hukum yang memiliki kekuatan eksekutorial serta kedudukan yang sama dengan *groose akte*, yaitu putusan pengadilan perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Keterlibatan Surat Paksa dalam penagihan pajak merupakan manifestasi dari hakikat pajak sebagai pungutan yang bersifat dapat dipaksakan. Dengan adanya Surat Paksa tersebut maka pihak fiskus

dapat secara tidak langsung memaksa Wajib Pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya sehingga dapat meningkatkan pencairan tunggakan Wajib Pajak. Hasil ini memberikan arti bahwa Surat Paksa merupakan salah satu faktor yang menentukan tinggi rendahnya pencairan tunggakan WP Badan.

3. Pengaruh Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada tabel 13 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) terhadap Pencairan Tunggakan WP Badan sebesar 0,133. Pengaruh tersebut signifikan dibuktikan dengan uji t yang menunjukkan $\text{sig.t } (0,040 < \alpha (0,05))$. Hasil pengujian tersebut menerima hipotesis yang telah diajukan, SPMP berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan WP Badan. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) memiliki pengaruh positif terhadap Pencairan Tunggakan WP Badan artinya setiap peningkatan variabel SPMP sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan Pencairan Tunggakan WP Badan sebesar 0,133.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Kumalasari (2004), yang menyimpulkan bahwa jumlah penerbitan SPMP menunjukkan adanya pengaruh yang nyata dan berhubungan positif dengan Pencairan Tunggakan WP Badan. Selain itu, Rifqiansyah (2014) dalam hasil analisisnya menyimpulkan bahwa Penagihan Pajak dengan SPMP dapat dikatakan sudah efektif.

Menurut Faisal (2009:210), apabila Wajib Pajak, setelah jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Paksa tetap tidak melunasi pajaknya, maka petugas juru

sita pajak dapat melakukan penyitaan. Tindakan penyitaan dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, di manapun keberadaanya; di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau ditempat lain. Teori yang dikemukakan oleh Faisal tersebut dapat mendukung hasil penelitian dari Peneliti, karena dengan adanya Penyitaan tersebut maka Wajib Pajak terpaksa akan melunasi tunggakan pajaknya sebelum barang yang disita tersebut dilelang atau jika Wajib Pajak tidak segera melunasi tunggakan pajak maka barang sitaan akan di lelang dan hasil lelang akan digunakan untuk melunasi tunggakan pajaknya. Terbukti bahwa SPMP berpengaruh kuat terhadap Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Badan.

4. Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Secara Bersama-Sama terhadap Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan hasil uji F yang telah dilakukan pada tabel 16, menunjukkan bahwa $\text{sig.F } (0,000 < \alpha (0,05))$ yang berarti dapat ditarik kesimpulan menerima hipotesis yang telah diajukan, yaitu Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap Pencairan Tunggakan WP Badan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Kumalasari (2004), yang menunjukkan bahwa jumlah Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, semuanya menunjukkan adanya pengaruh yang nyata dan berhubungan positif dengan

Pencairan Tunggakan WP Badan. Penelitian ini juga mendukung teori dari Faisal (2009:210), penagihan pajak merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan administrasi pajak dalam rangka memastikan Wajib Pajak patuh dalam melunasi utang pajaknya. Tindakan penagihan pajak dilakukan terhadap Wajib Pajak penunggak pajak. Penagihan pajak merupakan upaya terakhir kantor pajak dalam mencairkan piutang pajak negara. Penagihan pajak dalam penelitian ini adalah menyangkut penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Dari teori tersebut dapat dilihat bahwa penagihan pajak dapat menjadi alat untuk Pencairan Tunggakan WP Badan, karena pada prinsipnya tindakan penagihan pajak secara khusus memang difungsikan sebagai alat untuk menagih tunggakan pajak. Oleh karena itu, jika penagihan pajak dijalankan secara intensif, maka akan dapat meningkatkan pencairan tunggakan pajak.

Hasil pengolahan data statistik menunjukkan bahwa tindakan penagihan pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan berpengaruh signifikan positif terhadap Pencairan Tunggakan WP Badan. Hasil ini memberikan arti bahwa penagihan pajak dengan surat-surat tersebut merupakan faktor yang menentukan tinggi rendahnya pencairan tunggakan pajak. Apabila tindakan penagihan tersebut dilakukan secara intensif maupun efektif, maka akan menyebabkan pencairan tunggakan pajak semakin besar. Sebaliknya, jika tindakan penagihan tersebut tidak dilakukan dengan intensif dan efektif maka akan menyebabkan pencairan tunggakan pajak semakin kecil.